

HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MUKA UMUM DALAM  
PERSPEKTIF TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MENURUT PASAL  
156 KUHP DAN PASAL 28 AYAT (2) UU ITE

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
ANNISA PARASTYANI  
201610110311136

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2020

## **TUGAS AKHIR**

### **HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MUKA UMUM DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MENURUT PASAL 156 KUHP DAN PASAL 28 AYAT (2) UU ITE**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar kesarjanaan  
dalam bidang Ilmu Hukum*

Oleh :

**ANNISA PARASTYANI  
NIM : 201610110311136**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2020**

**HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MUKA UMUM DALAM  
PERSPEKTIF TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MENURUT  
PASAL 156 KUHP DAN PASAL 28 AYAT (2) UU ITE**

Diajukan Oleh:

**ANNISA PARASTYANI**

**201610110311136**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

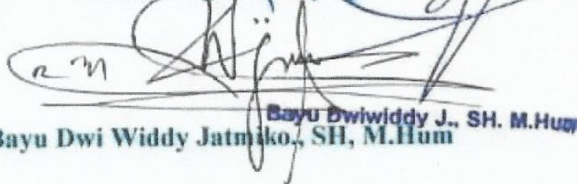
Pada, Senin 20 Juli 2020

Pembimbing Utama,



**Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,



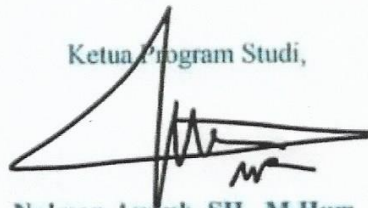
**Bayu Dwi Widdy Jatmiko, SH., M.Hum**

Dekan,



**Shil M.Hum**

Ketua Program Studi,



**Nu'man Aunuh, SH., M.Hum**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**ANNISA PARASTYANI**

**201610110311136**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Senin 20 Juli 2020

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Bayu Dwi Widdy Jatmiko., SH, M.Hum

Penguji I : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

Penguji II : Catur Wido Haruni, SH. M.Si., M.Hum

Bayu Dwiwiddv J., SH. M.Hum

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ANNISA PARASTYANI

NIM : 201610110311136

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MUKA UMUM DALAM  
PERSPEKTIF TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MENURUT  
PASAL 156 KUHP DAN PASAL 28 AYAT (2) UU ITE

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 02 September 2020

Annisa Parastyani

**Ungkapan Pribadi :**

*Bukan sebagai penutup dan akhir dari segala hal yang ada.*

*Tapi, Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Tuhan dan kedua orang tua Saya*

*Serta segala pihak yang hadir, telah memiliki porsi masing-masing dalam hidup Saya.*

*Terima kasih, untuk diri sendiri,*

*Telah bertahan hingga detik ini.*

*Mengamini bahwa ini adalah proses yang luar biasa untuk mencapai semua*

*Untuk setidaknya mencapai batas minimum dan berjalan dengan baik*

*Terlepas bagaimana nanti semua hasilnya,*

*Saya berusaha tidak kecewa*

*Karena tau bahwa proses yang dilalui sedemikian rupa.*

*Justru bangga dengan proses yang ada.*



**Motto :**

*Believe you can do it and make it happen*

## **ABSTRAKSI**

**Nama : Annisa Parastyani**  
**NIM : 201610110311136**  
**Judul : HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MUKA UMUM  
DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA UJARAN  
MENURUT PASAL 156 KUHP DAN PASAL 28 AYAT (2)  
UU ITE**  
**Pembimbing : Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum  
Bayu Dwiwiddy Jatmiko, S.H., M.Hum**

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut paham demokrasi. Hal tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan begitu setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajibannya, salah satunya hak kebebasan berpendapat di muka umum. Namun hak kebebasan berpendapat di muka umum seringkali melewati batasannya sehingga dapat dianggap sebagai tindak pidana ujaran kebencian dan sisi lain dapat melanggar hak asasi manusia orang lainnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa makna dan batasan hak kebebasan berpendapat di muka umum dalam perspektif tindak pidana ujaran kebencian menurut pasal 156 KUHP dan pasal 28 ayat (2) UU ITE. Penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis normatif yang yuridisnya terkait pasal 156 KUHP dan pasal 28 ayat (2) UU ITE, serta memiliki normatif yaitu hak kebebasan berpendapat di muka umum dalam perspektif tindak pidana ujaran kebencian. Selain itu, penulisan hukum ini memiliki sumber data primer, sekunder, dan tersier berupa peraturan perundang-undangan terkait pembahasan, berita yang ada di masyarakat, serta jurnal di internet dan kamus besar bahasa asing serta hukum. Hasil dari penulisan hukum ini adalah terkait makna dan batasan hak kebebasan berpendapat di muka umum dalam perspektif tindak pidana ujaran kebencian menurut pasal 156 KUHP dan pasal 28 ayat (2) UU ITE ini belum memiliki batasan limitatif normatif dari perbuatan yang dinyatakan dalam kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum sehingga tidak ada indikasi yang memberikan kepastian hukum terkait perbuatan yang termasuk dalam ujaran kebencian. Sehingga diperlukan adanya sebuah pembaharuan hukum untuk menjamin suatu kepastian hukum yang konkret.

**Kata Kunci : Hak Kebebasan Berpendapat Di Muka Umum, Ujaran Kebencian, Hak Asasi Manusia, Demokrasi Dan Hukum, Pasal 156 KUHP Dan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE.**



## ***ABSTRACT***

**Name** : Annisa Parastyani  
**NIM** : 201610110311136  
**Title** : **THE RIGHT TO FREEDOM OF OPINION IN  
PUBLIC IN THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL  
ACTS OF HATE SPEECH ACCORDING TO  
ARTICLE 156 KUHP AND ARTICLE 28  
PARAGRAPH (2) UU ITE**  
**Thesis Adviser** : **Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum  
Bayu Dwiwiddy Jatmiko, S.H., M.Hum**

Indonesia is a law state that embraces democracy. This has been stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. That way every Indonesian state has its rights and obligations, one of which is the right to freedom of speech in public. However, the right to freedom of expression in public often exceeds its limits so that it can be considered a criminal act of hate speech and the other side can violate the human rights of others. The purpose of this study is to find out and analyze the meaning and limitations of the right to freedom of expression in public in the perspective of criminal acts of hate speech according to article 156 of the Criminal Code and article 28 paragraph (2) of the ITE Law. The writing of this law uses a normative juridical method whose jurisdiction is related to article 156 of the Criminal Code and article 28 paragraph (2) of the ITE Law, and has a normative namely the right of freedom of expression in public in the perspective of criminal acts of hate speech. In addition, the writing of this law has primary, secondary and tertiary data sources in the form of legislation related to discussions, news in the community, as well as journals on the internet and large dictionaries of foreign languages and law. The results of writing this law are related to the meaning and limitations of the right to freedom of opinion in public in the perspective of criminal acts of hate speech according to article 156 of the Criminal Code and article 28 paragraph (2) of the ITE Law does not yet have normative normative limits of actions expressed in freedom of expression in public face so that there are no indications that provide legal certainty related to acts included in hate speech. So that a legal discussion is needed to guarantee a concrete legal certainty.

**Keywords** : Freedom of Public Opinion, Hate Speech, Human Rights, Democracy and Law, Article 156 KUHP and Article 28 Paragraph (2) UU ITE.



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan kasihNya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang mengambil judul ***“HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MUKA UMUM DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MENURUT PASAL 156 KUHP DAN PASAL 28 AYAT (2) UU ITE”***.

Tujuan penulisan hukum ini untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) bagi mahasiswa jenjang pendidikan Strata-1 (S-1) di Program Studi Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penulisan hukum ini.

Dalam penyelesaian penulisan tugas akhir ini penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak berupa dukungan secara moril serta sumbangsih pemikiran. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini Penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena atas kasih dan ridho-Nya Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu dan selalu diberikan kemudahan serta kejernihan pikiran dalam pengerjaannya;
2. Kedua Orang Tua dan Kakak Adik Saya serta keluarga besar yang selalu memberikan doa, kasih sayang, pengertian, bantuan secara moril serta materiil sehingga Penulis dapat mengerjakan penulisan tugas akhir ini dengan baik dan pada akhirnya bisa menjadi mahasiswi yang akan memperoleh gelar S-1 Sarjana Hukum;
3. Dr. Fauzan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, yang menjadi teladan bagi Penulis selama menimba ilmu di Kampus Putih tercinta, Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajarannya;
4. Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I Penulis yang selalu baik dan sabar membimbing Penulis, memberikan semangat dan motivasi yang tiada hentinya, serta memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi Penulis yang belum pernah Penulis dapatkan sebelumnya;
5. Bayu Dwiwiddy Jatmiko, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II penulis yang senantiasa sabar baik dan teliti saat membimbing Penulis dan memberikan Penulis arahan yang pasti sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik;
6. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum, Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum (Wakil Dekan I), Dr. Haris, S.H., MH (Wakil

Dekan II), Said Noor P, S.H., M.H (Wakil Dekan III), dan seluruh jajarannya terima kasih telah menjadi motivator dan inspirasi Penulis;

7. Dr. Sulardi, S.H., M.Si., selaku dosen Wali Kelas C tahun angkatan 2016 yang telah banyak memberikan motivasi serta memberikan banyak kesempatan dan kepercayaan bagi Penulis untuk mencoba banyak hal baru selama masa perkuliahan hingga saat penulisan tugas akhir ini;
8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala ilmu yang diberikan dan menjadi sosok hebat yang selalu penulis kagumi. Terimakasih telah sabar mengajar dan membimbing penulis dalam segala mata kuliah yang telah penulis tempuh. Semoga ilmu yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Dosen bisa bermanfaat bagi penulis baik di dunia maupun di akhirat. Jasa-jasa beliau tidak dapat Penulis ungkapkan lagi, sungguh tiada batasnya;
9. Novia Elsa Christiyanti yang merupakan sahabat Penulis serta yang selalu menemani Penulis untuk hidup bersama dan saling mensupport di dunia perkuliahan sejak tahun ajaran pertama hingga akhirnya Penulis dapat lulus dari masa perkuliahan ini;
10. Nabila Firdha Rila Makaramah yang tidak henti-hentinya merepotkan hingga menyusahkan Penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Serta selalu mendukung agar dapat mencapai tujuan masing-masing.
11. Mivcha De Savernaya, Annisa Permatasari Mahardani, Almira Sahfiri, Rieza Shintya, dan Izzalatus Syidda yang merupakan teman-teman Penulis dan selalu berusaha memberikan semangat serta menghibur Penulis selama berada di masa perkuliahan;
12. Nurwendo Wisang Guritno, S.M beserta keluarganya yang membuat Penulis merasa memiliki keluarga kedua selama berada di Kota Malang untuk menuntut ilmu.
13. Allisya Regita Cahyani dan Regita Cahya Gumilang yang merupakan sahabat Penulis dan selalu ada untuk Penulis.

Malang, 14 Juli 2020  
Penulis

**Annisa Parastyani**

## DAFTAR ISI

Lembar Cover/Sampul Dalam .....	i
Lembar Pengesahan Pembimbing .....	ii
Lembar Pengesahan Penguji .....	iii
Surat Pernyataan Penulisan Hukum Bukan Hasil Plagiat .....	iv
Ungkapan Pribadi/Motto.....	v
Abstraksi .....	vi
Abstract.....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi .....	x
Daftar Lampiran .....	xiii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kegunaan Penelitian.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan .....	17

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hak Dan Kewajiban .....	19
1. Pengertian Hak .....	19
a. Pengertian Hak Secara Umum .....	19
b. Pengertian Hak Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.....	19
c. Pengertian Hak Menurut Para Pendapat Ahli .....	20
2. Pengertian Kewajiban .....	21
a. Pengertian Kewajiban Secara Umum.....	21
b. Pengertian Kewajiban Menurut KBBI.....	22
c. Pengertian Kewajiban Menurut Para Pendapat Ahli.....	22
B. Pengakuan Dan Pengaturan Hak Dan Kewajiban Dalam Sistem Hukum Indonesia .....	23
1. Hak Dan Kewajiban Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	23
2. Macam-macam Hak Dan Kewajiban .....	24
a. Hak Warga Negara Indonesia .....	25
b. Kewajiban Warga Negara Indonesia.....	26
C. Ruang Lingkup Hukum Pidana.....	28
1. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur Tindak Pidana.....	28
a. Pengertian Tindak Pidana .....	28

b. Pengertian Unsur Tindak Pidana.....	29
2. Tinjauan Tentang Kesalahan Dan Pertanggung Jawaban Pidana ..	30
a. Pengertian Kesalahan .....	30
b. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	32
3. Tinjauan Tentang Pidana.....	34
a. Teori-teori Pidana.....	34
b. Tujuan Pidana .....	36
c. Bentuk-bentuk Pidana Atau Sanksi Pidana .....	38
D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Ujaran Kebencian .....	41
1. Macam-macam Tindak Pidana uJaran Kebencian .....	41
2. Dasar Hukum Yang Mengatur Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Sitem Hukum Indonesia .....	43
3. Aspek-aspek Ujaran Kebencian .....	45
4. Sarana Untuk Melakukan Ujaran Kebencian .....	47
5. Unsur-unsur Ujaran Kebencian.....	50
E. Tinjauan Tentang Kejahatan .....	51
1. Pengertian Kejahatan .....	51
2. Pengertian Kejahatan Internet.....	52
3. Media Sosial.....	52
F. Tinjauan Umum Tentang Hak Kebebasan Berpendapat Di Muka Umum.....	53
1. Pegertian Hak Kebebasan Berpendapat Di Muka Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 .....	53
2. Pengertian Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998.....	54
3. Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Belum Menjamin Kemerdekaan Berpendapat .....	55
4. Tinjauan Umum Tentang Kebebasan Berekspresi .....	56
a. Pengertian Kebebasan Berekspresi .....	56
5. Kebebasan Berkekspresi Dalam Jaminan Hak Asasi Manusia .....	57

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Makna dan Batasan Hak Kebebasan Berpendapat Di Muka Umum Dalam Perspektif Tindak Pidana Ujaran Kebencian Menurut Pasal 156 KUHP .....	60
B. Makna dan Batasan Hak Kebebasan Berpendapat Di Muka Umum Dalam Perspektif Tindak Pidana Ujaran Kebencian Menurut Pasal 28 Ayat (2) UU ITE .....	84

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	107
---------------------	-----

B. Saran.....	108
---------------	-----

**Daftar Pustaka**

**Lampiran**



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Tugas**  
**Lampiran 2 : Kartu Kendali Bimbingan Skripsi**  
**Lampiran 3 : Berita Acara Seminar**



## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU :**

- Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampal Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. hlm. 22
- Asril Sitompul. 2004. *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 71
- Barda Nawawi Arif. 2006. *Tindak Pidana Mayantara*. Rajawali Pers. Jakarta. hlm. 02
- Budi Suhariyanto. 2014. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 2
- Djoko Prakoso. 2000. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Dan Eksaminasi Perkara Di Dalam Proses Pidana*. Liberty. Yogyakarta. hlm. 47
- Jimly Asshiddique. 2006. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*. Konstitusi Press. Jakarta. hlm. 21
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2015. *Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*. Jakarta. hlm. 9
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2015. *Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*. Jakarta. hlm. 13
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta. hlm. 46
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta. hlm. 49
- Nawawi Arief, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 23
- Nockleby John. 2000. *Hate Speech*. Encyclopedia of the American Constitution. US, hlm. 79
- P.A.F. Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 16



P.A.F. Lamintang. 1998. *Hukum Penitensier Indonesia*. Armico. Bandung. hlm. 69

P.A.F LAMINTANG. 1987. *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*. Sinar Baru. Bandung. hlm. 457

Simanjuntak, CC Maruli. *Atas Nama Kebencian, Kajian Kasus-Kasus Kejahatan Berbasis Kebencian di Indonesia*. Yayasan Bantuan Hukum Indonesia. Jakarta. hlm. 12

Syutan Renny Syahdeini. 2009. *Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer*. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta, hlm. 27

Todung Mulya Lubis. 1993. *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. hlm. 16

Todung Mulya Lubis. 2003. *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia*. Yayasan Obor. Jakarta, hlm. 17

Tolib Setiady. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta. Bandung. hlm. 77

Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Sumur Bandung. Bandung. hlm. 16

### **JURNAL :**

Albert Hasibuan. 2008. *Politik Hak Asasi Manusia dan UUD 1945*". Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. hlm. 11

Almira Rahma Sabela dan Dina Wahyu Pritianingtias. 2017. *Kajian Freedom of Speech and Expression dalam Perlindungan Hukum Terhadap Demontran di Indonesia*. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang

Bleich Erik. 2011. *The Rise of Hate Speech and Hate Crime Laws in Liberal Democracies*. Journal of Ethnic and Migration Studies, hlm. 917-934

Gusti Ayu Made Gita Permatasari dan Komang Pradnyana Sudibya. 2016. *Tinjauan Yuridis Mengenai Pengaturan Dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial*. Fakultas Hukum. Universitas Udayana. Bali

Muliadi. *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Di Muka Umum*. Universitas Muhammadiyah Palu

Panta Rei. 2007. *Konsorsium Reformasi Hukum Nasional*. Jakarta

T.M. Scanlon. Jr. 1978. *Freedom of Expression and Categories of Expression*. Law Review. University Pittsburg. hlm. 9

Sidik Sunaryo dan Shinta Ayu Purnamawati. *Paradigma Hukum Yang Benar Dan Hukum Yang Baik (Perspektif Desain Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia)*. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Malang.

### **INTERNET :**

Aktif Belajar, *Akibat Mengemukakan Pendapat Tanpa Batas*, <http://aktifbelajar.com>, diakses tanggal 03 Juli 2020

Alfina Fajrin, *Indonesia Sebagai Negara Hukum*, <http://kompasiana.com>, diakses tanggal 11 April 2020

Artikel Pendidikan, *Pengertian Hak Dan Kewajiban Menurut Para Ahli*, <http://artikependidikan.id>, diakses tanggal 12 Mei 2020

Gufron Maburi, *Kebebasan Berekspresi dan Ujaran Kebencian*, <http://imparsial.com>, diakses tanggal 18 Juni 2020

Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Pengertian Provokasi*, <http://kbbi.web.id/provokasi&ei>, diakses tanggal 03 Juni 2020

Litigasi Gemapers Keadilan, *Jeratan Hukum Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, <http://litigasi.co.id>, diakses tanggal 16 April 2020

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Dengan UUD 45*, <http://mkri.id>, diakses tanggal 10 Mei 2020

PPKN, *Hak Dan Kewajiban Warga Negara*, <http://ppkn.co.id>, diakses tanggal 12 Mei 2020

PT. KOMUNIKASI. *Pengertian Media Sosial*, <http://komunikasi.google.co.id>, diakses tanggal 04 Juni 2020

Reda Manthovani, *Meluruskan Istilah Kritik, Fitnah dan Ujaran Kebencian*, <http://hukumonline.com>, diakses tanggal 16 April 2020

Taufik Firmanto, *Negara Demokratis yang Berdasarkan Hukum*, <http://kompasiana.com>, diakses tanggal 11 April 2020

Vidya Prahassacitta, *Tumpang Tindih Lingkup Dan Ketentuan Pidana Mengenai Ujaran Kebencian Di Indonesia*, <http://business-law.binus.ac.id>, diakses tanggal 15 April 2020

Widy Wardhana, *Pengertian Hak Dan Keawjiban Warga Negara*, <http://academia.edu>, diakses tanggal 12 Mei 2020

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

ICCPR Pasal 19 Ayat 2 dan 3

Konvenan Hak Sipil Politik 1996

R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea. Bogor. hlm. 225

R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea. Bogor. hlm. 136

R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea. Bogor. hlm. 269

R. Soesilo. 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea. Bogor. hlm. 200

Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 Tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum